

## BAB V

### Kesimpulan

Bab ini akan menjadi bagian terakhir dari sistematika penulisan yang telah penulis rancang sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari empat bab sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran dari keseluruhan karya tulis ini.

Sengketa Laut China Selatan merupakan konflik yang melibatkan China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunie Darussalam terhadap perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi yang menjadi perdebatan klaim. Sebab dikelilingi banyak negara inilah yang kemudian menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai wilayah dengan tingkat kemungkinan konflik yang tinggi. Terlebih lagi kawasan ini memiliki tingkat daya tarik yang tinggi pula karena potensinya.

Laut China Selatan terdiri atas gugusan karang ini memiliki potensi *tangible* dan *intangible power* yang tinggi. Setidaknya ada 4,8 miliar barrel minyak dan 64 miliar kubik gas alam menurut U.S. Geological Survey di bawah laut kawasan ini sebagai iming-iming *tangible power*-nya yang mencolok. Tidak hanya gas alam, Laut China Selatan juga ditafsir memiliki kekayaan ekosistem laut yang luar biasa kaya, mulai dari keragaman karang sampai melimpahnya jumlah ikan. Selain itu, jalur pelayaran internasional menjadi tindakan dari *intangible power* di kawasan ini. Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk kedua didunia dengan melibatkan perjalanan kapal super tanker, sampai kapal niaga di dalamnya. Kapal-kapal dengan bahan angkutan gas

alam dan minyak bumi sebagian besar akan melewati kawasan ini sebelum akhirnya mencapai pasar dunia. Sehingga menarik bagi negara-negara disekitarnya untuk memanfaatkan potensi-potensi tersebut dengan memberikan klaim terhadap kawasan Laut China Selatan.

Namun sebab eksistensi sengketa ini tidak hanya dikarenakan adanya klaim saja, namun diperparah dengan munculnya klaim berlapis yang diajukan oleh negara-negara pengklaim, dimana setiap negara mengajukan acuan mendasar terhadap klaim dan berupaya agar dapat mencapai tujuannya. Ini membuat situasi menjadi cukup rumit. Perbedaan dasar klaim terbagi atas aturan UNCLOS dan peta sejarah. Ini jelas merupakan dua hal yang berbeda namun mendasar bagi setiap ajuan klaim.

Dikarenakan dasar klaim yang berbeda inilah kemudian setiap negara pengklaim memberikan penolakannya terhadap klaim negara lain. Perdebatan-perdebatan antara setiap negara pengklaim bermunculan lewat tindakan pengklaiman kawasan yang terang-terangan. Beberapa negara seperti, China, Filipina, dan Vietnam mulai mendekati area sengketa dengan menduduki pulau-pulau yang diklaimnya. Hal ini kemudian memicu munculnya insiden-insiden yang disebabkan oleh bersinggungannya negara-negara pengklaim di area kawasan.

Insiden-insiden yang terjadi di Laut China Selatan telah melibatkan pihak-pihak yang kemudian mendapatkan kerugian serta secara berkesinambungan pula telah memberikan dampak menurunnya tingkat kestabilan kawasan. Hal ini kemudian menjadikan konflik kawasan sebagai perhatian dunia secara tidak langsung. Terlebih dengan fungsi besar dari kawasan Laut China Selatan yang tidak hanya dimanfaatkan oleh negara-negara sekitarnya saja, namun juga seba-

gian jalur lalu lintas dunia. Tingkat ketidakstabilan kawasan menjadi sesuatu yang penting sehingga sengketa ini kemudian menjadi terinternasionalisasikan dan mengundang perhatian berbagai pihak yang tidak terlibat sekalipun untuk setidaknya mengajukan usulan berupa penyelesaian konflik. Termasuk Amerika Serikat –yang secara kawasan tidak mungkin terlibat dengan isu sengketa– merasa bahwa apa yang terjadi Laut China Selatan merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan.

Amerika Serikat menganggap, bahwa adanya pertikaian antar negara pengklaim menjadikan stabilitas kawasan menurun dan dikhawatirkan akan berdampak pada aspek lain secara tidak langsung. Membawa predikatnya sebagai ‘polisi dunia’ pula, Amerika Serikat merasa bahwa kawasan ini tidak selayaknya menjadi lahan pertikaian yang menyebabkan terancamnya keamanan suatu wilayah. Sehingga gagasan agar diadakannya upaya penyelesaian bagi sengketa kawasan Laut China Selatan semakin kuat.

Melalui kebijakannya terhadap upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan inilah Amerika Serikat kemudian ikut terlibat melalui kebijakan diplomasi politik dan diplomasi keamanannya melalui jalinan kerjasama dengan negara aliansi maupun hubungan kerjasamanya berama organisasi regional setempat. Berawal dari hubungan bilateral Amerika Serikat dan Filipina yang tertera dalam ‘Perjanjian Pertahanan Mutual’ sejak 30 Agustus 1951, Washington mulai terlibat dalam perputaran konflik Laut China Selatan. Kerjasama VFA (*Visiting Forces Agreement*) yang kembali direvitalisasi pada 1999 membawa kehadiran pasukan Amerika Serikat semakin dekat dengan kawasan sengketa. Hal ini juga dikarenakan kondisi pertahanan pasukan Manila termasuk dalam deretan penegakan militer yang rendah,

sehingga dengan adanya VFA pasukan milik Filipina dapat terbantu dengan persenjataan dan pasukan Amerika Serikat yang lebih mumpuni. Melalui kerjasama ini pula, Amerika Serikat kemudian memiliki akses yang memungkinnnya menelisik kawasan sengketa dalam jarak yang lebih dekat.

Selain membangun kerjasama dengan negara aliansinya, Filipina, oleh Bill Clinton, Amerika Serikat juga kembali menjalin hubungan bilateral dengan negara pengklaim lainnya yakni, Vietnam. Menandai kerjasama ini, Amerika Serikat yang telah 19 tahun memberikan embargo terhadap Vietnam akhirnya membuat kebijakan baru dengan mencabut sementara embargo tersebut. Hal ini dilakukan Amerika Serikat mengingat tingkat kemampuan pasukan milik Vietnam tidak jauh berbeda dengan pasukan Filipina. Pasukan Vietnam butuh persenjataan yang lebih memadai untuk mengamankan wilayahnya maupun kawasan yang diklaimnya.

Hubungan kerjasama ini terus berlanjut, pada masa kepemimpinan George. W. Bush, Amerika Serikat kembali membentuk kerjasama yang dinamai JUSMAG (*Joint U.S. Military Advisory Group*) yang berfungsi memberikan nasihat dan bantuan kepada AFP (*Armed Forces of the Philippines*) tentang pelatihan pertahanan dan militer kepada pasukan angkatan bersenjata milik Filipina. Kerjasama ini juga berupa bantuan logistik, dimana Amerika Serikat menyediakan peralatan militer, pasukan dan pemeliharaan kepada Filipina. Hal ini juga terkait penempatan pasukan Amerika Serikat yang akan mengisi pangkalan milik Filipina. Angkatan bersenjata Amerika Serikat juga akan memberikan pelatihan kepada AFP secara berkala.

Pada awal 2000-an, kerjasama hubungan militer antara Amerika Serikat dan Vietnam secara signifikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kerjasama baru disepakati dengan upaya pelatihan bagi pasukan Vietnam dan Amerika Serikat menyepakati dibentuknya IMET (*International Military Education and Training*). Kerjasama ini dibuat untuk membuka pelatihan bahasa Inggris dari Amerika Serikat terhadap pasukan militer Vietnam. Dua tahun berikutnya Amerika Serikat memodifikasi ITAR (*International Traffic in Arms Regulations*) mengenai lisensi perizinan untuk perdagangan barang dan jasa ke Vietnam. Ini terkait dengan pembelian dan anggaran yang Vietnam keluarkan untuk sektor pertahanan (Manyin, 2012, p. 21). Pada 2008 Amerika Serikat kembali membuat perkembangan kerjasamanya bersama Vietnam dengan adanya penambahan Vietnam ke dalam program GSP (*Generalized System of Preferences*), FMS (*Foreign Military Sales*), *the creation of a bilateral education task*, ataupun diskusi Korps Perdamaian. Serat pembicaraan kerjasama lebih lanjut antara Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, Vietnam dan Menteri Pertahanan Robert Gates, di Pentagon perihal komunikasi gabungan menjanjikan dukungan Amerika Serikat untuk kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial nasional Vietnam (CSEA, 2010).

Setelah Clinton dan Bush, pada tahun 2010 Amerika Serikat dan Vietnam melaksanakan *Defense Policy Dialogue* yang membahas tentang politik, keamanan, dan masalah pertahanan setelah sebelumnya juga telah menandatangani kerjasama militer *Statement of Intent on Military Medical Cooperation* di Hanoi dibawah masa pemerintahan Barack Obama. Hubungan militer keduanya meliputi; keterlibatan angkatan laut Amerika Serikat dan Vietnam dalam pelatihan noncombat (dalam hal ini terkait kontrol ke-

rusakan, latihan penyelamatan, dan lain-lain) yang dilaksanakan di kapal USS John S. McCain pada 2010 dan 2011, galangan kapal Vietnam yang memperbaiki dua kapal milik Komando Sealift militer Amerika Serikat pada 2010, serta ditahun 2011 Kementerian Pertahan Vietnam untuk pertamakalinya mengirim pasukannya ke perguruan tinggi staf Amerika Serikat dan lembaga militer lainnya (Manyin, 2012, p. 20).

Setelahnya, kedua negara melakukan kunjungan bilateral dengan agenda pembahasan hubungan kerjasama yang terus diperbarui dan memperkuat komitmen bersama. Selain itu pada 2016, Amerika Serikat akhirnya mencabut sanksi embargo senjata terhadap Vietnam secara penuh. Ini didasari oleh sulitnya pengadaan senjata yang dialami Vietnam selama mendapat sanksi embargo. Sehingga dengan adanya pencabutan sanksi embargo ini, pasukan Vietnam diharapkan dapat lebih berkembang dan mampu mempertahankan kawasannya.

Pada tahun 2014 Barack Obama dan Filipina menandatangani kesepakatan baru yaitu, EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) oleh Sekretaris Filipina saat itu bersama duta besar Amerika Serikat untuk Filipina saat itu. Penandatanganan perjanjian ini pula ditujukan untuk menekan China selaku negara pengklaim yang selalu bertindak agresif di kawasan sengketa. Point terpenting dari EDCA ialah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini akan sama dengan kehadiran pasukan militer Amerika Serikat yang bersifat rotasional. Sehingga diharapkan dapat memperkuat penentuan klaim Filipina atas klaimnya di kawasan Laut China Selatan, maupun menguatkan tekad dan kredibilitas Amerika Serikat dalam mendukung dan menghormati pertahanan komitmen Filipina (Castro, 2016). Selain itu EDCA sendiri merupakan bentuk bantuan Amerika Serikat dalam hal kon-

struksi fasilitas vital, peningkatan infrastruktur, penyediaan dan penyimpanan peralatan, serta pelatihan bersama yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi Filipina (Castro, 2016).

Secara keseluruhan, upaya kerjasama yang dibangun oleh Obama pada upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan nyatanya banyak mengadopsi kebijakan yang serupa dengan masa jabatan Clinton dan Bush. Namun, bentuk kebijakan kerjasama yang Obama lakukan terhadap Filipina maupun Vietnam memiliki garis singgung yang berputar pada pola Clinton. Dalam artian, kebijakan kerjasama yang Obama lakukan merupakan adopsi kebijakan yang telah Clinton ambil sebelumnya, hanya saja pada masa jabatan Obama bentuk kebijakan kerjasama ini mengalami perkembangan dan telah mengalami modifikasi. Ini dibuktikan dengan munculnya revitalisasi perjanjian yang membentuk EDCA antara Amerika Serikat dan Filipina.

Hal ini sedikit berbeda dengan presiden sebelumnya yaitu, George W. Bush. Jika penempatan pasukan yang dilakukan oleh Obama didasari oleh adanya upaya perbaikan kondisi terhadap negara sekutu, ini jelas berbeda saat Bush berusaha menempatkan pasukan di kawasan Laut China Selatan sebagai salah satu bentuk penekanan terhadap China lewat JUSMAG. *Defense Policy Dialogue* juga merupakan upaya perundingan yang dilakukan Obama melalui pemberdayaan pasukan melalui pelatihan, bukan secara terang-terangan memberikan pengaruh *hard diplomacy* terhadap negara sekutu seperti yang Bush terapkan.

Secara garis besar, perbedaan yang mencolok antara era Bush dan Obama memiliki arah tujuan yang berbeda. Sehingga seperti yang terjadi di Filipina,

Bush lebih memperhatikan permasalahan terorisme dan tindakan yang harus dilakukan seperti pada kelompok separatis islam disana. Bush bermaksud untuk memperkuat kekuatan Filipina melalui perlawanan menghadapi teroris dan juga menunjukkan kekuatannya terhadap ancaman Asia baru, yakni China. Sedangkan Obama menjadikan pendekatannya dengan Filipina dalam agenda pembahasan Laut China Selatan juga bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama dengan negara yang menjalin hubungan bilateral dangannya ini, yaitu mendapatkan hasil akhir dari sengketa. Penyelesaian sengketa dan pemulihan kawasan menjadi target Obama. Ini jelas berbeda dengan Bush yang lebih mementingkan pertahan eksistensi kekuatan juga intervensi tersulubung lewat penempatan pasukan Amerika Serikat di Filipina.

Kesamaan kebijakan yang dibuat antara Clinton dan Obama ini kemudian menunjukan adanya kecenderungan pembuatan kebijakan yang dilatar belakangi oleh asal partai pengusung presiden. Bill Clinton dan Barack Obama merupakan salah dua presiden Amerika Serikat yang diusung oleh partai Demokrat dalam pencalonannya. Sehingga bentuk kebijakan yang dilakukan Obama pada dua kerjasama ini cenderung menunjukkan langkah keberlanjutan dan memiliki kemiripan bentuk kebijakan dengan yang pernah dilakukan oleh era kepemimpinan Clinton sebelumnya. Hal ini juga kemudian menimbulkan asumsi bahwa kesamaan partai pengusung pada setiap presiden memberikan faktor terhadap fokus dan arah kebijakan serta pola tindakannya.

Terbukti dengan adanya kemiripan dan keberlanjutan secara signifikan dari kebijakan yang Obama terapkan di Laut China Selatan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh Bill Clinton sebelumnya. Kesamaan ini juga tidak hanya terlihat dari bentuk ke-

bijakan, namun juga pola kebijakannya yang lebih memperlihatkan pada mempertahankan metode *soft diplomacy*. Kebijakan diplomasi politik dan diplomasi kemanan juga kemudian membuka jalan kerjasama Amerika Serikat dalam kerjasama bilateral secara politik dan aspek keamanan. Amerika Serikat menjadi partner perundingan dengan kerjasama multilateral dalam rang rangka diplomasi politiknya yang merupakan sebagian dari bukti bahwa kebijakan *soft diplomacy* yang dilakukan Obama dan Clinton memiliki kesamaan.

Diluar kesamaan pola penyelesaian konflik oleh dua presiden sebelumnya, yang mana lebih banyak memperhatikan kerjasama bilateral dengan negara yang terkait sengketa, presiden Amerika Serikat ke-44 ini justru turut melebarkan kerjasamanya melalui hubungan multilateral. Obama mulai mengalungkan tali kerjasama dengan organisasi regional terdekat dengan kawasan sengketa, yakni ASEAN.

Dalam pendekatannya, Amerika Serikat pada 2009 serta penempatan Duta Besar Amerika Serikat khusus untuk ASEAN pada 2011 (EAST ASIA SUMMIT: Hubungan Kemitraan ASEAN-EAST ASIA SUMMIT, 2016). Kerjasama ini juga didukung oleh hubungan baik antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN lainnya. Terhadap ASEAN sendiri, Amerika Serikat selalu menegaskan bahwa ASEAN mampu menjadi wadah negosiasi multilateral yang mumpuni. Ini juga didukung oleh posisi ASEAN sebagai organisasi regional terdekat dan yang dinilai paling berpotensi untuk menengahi permasalahan ini serta menjadi wadah yang lebih efektif lagi dalam memecahkan jalan penyelesaian. Seperti yang ditegaskan oleh analis kebijakan strategis Amerika Serikat untuk Asia, Douglas Paal bahwa, Amerika Serikat tidak ingin menjadi menjadi pihak ketiga, karena tidak

memiliki kepentingan apapun dalam sengketa di Laut China Selatan; kecuali menjaga hak-hak navigasinya serta penerapan aturan hukum yang terkait. Namun demikian, ASEAN dapat menjadi sumber pemersatu untuk menghadapi tekanan negara tertentu –yang mungkin saja dilancarkan secara individual oleh China atau pihak-pihak lain (Sherlita, 2011).

Bergabung dalam forum milik organisasi regional merupakan salah satu cara bagi Amerika Serikat agar dapat ikut menyuarakan masukannya. Sehingga ini juga mendorong keterlibatan Amerika Serikat dalam beberapa agenda forum milik ASEAN. Adalah forum-forum milik ASEAN yang mana Amerika Serikat telah memberikan upaya kerjasamanya, diantaranya; ARF (*Asia Regional Forum*), ASEAN Summit, dan ASEAN-U.S Summit.

Dalam setiap kesempatan yang dihadiri oleh Amerika Serikat terkait pembahasan isu oleh forum-forum tersebut, perwakilan dari Amerika Serikat secara berkelanjutan akan memberikan *statement* yang cenderung diulang. Opini Amerika Serikat yang berulang tentang dampak sengketa Laut China Selatan pun secara tidak langsung dapat membangun prespektif publik terhadap permasalahan ini. Dimana Amerika Serikat selalu mengaitkan permasalahan kawasan dengan kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan, sehingga mampu menggiring asumsi yang sama perihal dampak konflik yang belum selesai ini terhadap keberlangsungan isu yang dimaksud. Seperti yang selalu terselip dalam setiap pidato presiden Obama saat menghadiri forum multilateralnya. Presiden Obama kerap kali menyebutkan bahwa keteguhan Amerika Serikat untuk terus terbang dan berlayar di area sengketa demi mempertahankan hak navigasi setiap negara, serta tidak adanya hambatan terhadap perdagangan dunia. Selain itu Obama juga seringkali menyebutkan de-

sakannya terhadap penyelesaian konflik sengketa dengan mengutamakan jalan perdamaian, yaitu perundingan kerjasama.

Namun, terlepas dari upaya yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan, sengketa ini masih terus berlanjut bahkan digadagadag telah memasuki perahilan *chapter* baru dengan latar konflik yang belum akan selesai.

